
**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010
di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Pontianak**

Dwi Kusumawardani

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : kusumawardani_dwi@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah rekomendasi pelaksanaan kebijakan retribusi terminal. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang ada, dikarenakan target realisasi pungutan retribusi terminal yang tidak memenuhi target realisasi anggaran pada setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ketiga terminal yang ada di Kabupaten Pontianak, yaitu Terminal Mempawah, Terminal Sungai Pinyuh, dan Terminal Jungkat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementor masih kurang mengadakan sosialisasi agar objek retribusi dapat mengetahui dengan jelas isi dari peraturan daerah tersebut, masih kurangnya sumber daya manusia sebagai pemungut retribusi, sikap dari pelaksana masih kurang jujur dalam memungut retribusi, dan belum adanya SOPS (*Standar Operating Procedures*). Untuk rekomendasi pelaksanaan retribusi terminal adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang isi peraturan daerah agar pemungut retribusi tidak memungut tarif yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut, sumberdaya manusia perlu ditambahkan lagi khususnya petugas pemungut retribusi dilapangan, pelaksanaan dilapangan dapat ditingkatkan dengan memberi *reward* kepada petugas.

Kata Kunci : Retribusi Terminal, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

Abstract

This paper is intended to yield a recommendation the implementation policy terminal retribution. The tittle of this paper was appointed based on existing problems, due the target of realization terminal retribution tax was not fulfill the estimate target of realization in every year. This research used qualitative research model. location of research sites in Pontianak District are Mempawah Terminal, Sungai Pinyuh Terminal, and Jungkat Terminal.

The conclusions of this research are the implementor still lack socialization in order to the retribution object understand contents of regulation local clearly, still lack of human resources as retibution collectors, attitude of implementor still less of honest to collected the retribution, and there is no SOPS (Standard Operating Procedures). For recommendation the implementation of terminal retribution can be providing insight the contents of local regulation clearly in order that retribution collector do not collect unclear fare with that regulation local, human resources need added especially collector retribution officer, implementation in the field can be improved by giving rewards to officer.

Key words : Terminal Retribution, Communication, Resources, Disposition, bureaucratic structure

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Retribusi Terminal merupakan penggolongan sebagai retribusi jasa usaha. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum, dan mobil angkutan barang dilingkungan terminal yang dimiliki. Dalam pemungutan retribusi ini, tidak hanya diberlakukan untuk angkutan umum saja, tetapi kios dan gerobak yang ada didalam terminal. Dengan adanya retribusi terminal diharapkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pontianak akan juga meningkat.

Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata tidak hanya mengatur tentang Retribusi Terminal, akan tetapi masih banyak yang lainnya, seperti Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, tetapi hanya Retribusi Terminal saja yang tidak memenuhi target pendapatannya.

Setelah adanya pemekaran wilayah tahun 2007, terminal Kabupaten Pontianak hanya berjumlah 3 unit yakni Terminal Mempawah, Terminal Sui. Pinyuh, dan Terminal Jungkat. Ketidakberhasilan pencapaian target pemungutan retribusi berhubungan dengan proses implementasinya. Didalam proses implementasinya, retribusi terminal terdapat beberapa fenomena yang terjadi yang diduga sebagai kendala dalam pencapaian target.

Proses pelaksanaan pungutan retribusi terminal, Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan

Pariwisata telah melaksanakan sosialisasi kepada subjek retribusi. Sosialisasi ini dilakukan dalam memberikan pengetahuan kepada subjek retribusi terhadap isi Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2010 tentang retribusi terminal. Dalam proses sosialisasi ini baru diadakan sekali hingga sekarang.

Jumlah pegawai dari setiap terminal kurang memadai. Hal ini terlihat jelas di Terminal Jungkat dan Terminal Sungai Pinyuh hanya ada 1 (satu) orang pegawai dari Dinas Perhubungan, Mempawah Hilir hanya ada 2 (dua) orang pegawai. Dari jumlah staf yang bertugas untuk memungut setiap terminal ini, akan tidak efektif jika tidak adanya pergantian waktu untuk menjaga pos. Jika petugasnya sedang beristirahat, maka angkutan umum tentu tidak akan terkena pemungutan retribusi.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata jumlah dari angkutan umum yang ada di Kabupaten Pontianak ada 288 angkutan umum. Jumlah angkutan umum yang tidak beroperasi berjumlah 87 angkutan. Sehingga jumlah angkutan umum yang beroperasi 201. Berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Pontianak dikarenakan berkurangnya jumlah penumpang yang menggunakan angkutan umum. Jika minat para masyarakat tinggi untuk menggunakan angkutan umum, maka angkutan umum yang akan beroperasi juga akan ikut meningkat. Selain angkutan

umum, jumlah kios yang ada di Terminal Mempawah sebanyak 17 buah, gerobak sebanyak 50 buah. Di Terminal Sungai Pinyuh kios sebanyak 3 buah, dan gerobak sebanyak 4 buah. Sedangkan di Jungkat hanya ada gerobak sebanyak 5 buah.

Tingkah laku pelaksana dalam implementasi retribusi terminal harus memberikan sikap yang baik kepada subyek terminal. Sikap yang jujur menjadi salah satu acuan implementor dalam bertindak. Dalam pelaksanaan masih sering ditemukan pungutan retribusi yang tidak sesuai dengan besarnya pungutan sesuai dengan peraturan daerah.

Prosedur-prosedur kerja ukuran dasar (*Standard Operating Procedures*) dari peraturan daerah tentang retribusi terminal belum ada. Padahal hal ini merupakan aspek-aspek struktural paling dasar suatu organisasi dalam melaksanakan implementasi perda tersebut. SOP sangat berguna dalam organisasi-organisasi publik dan dapat menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

Fenomena-fenomena yang telah dijelaskan diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan tentang retribusi terminal di Kabupaten Pontianak belum berjalan secara optimal. Ketidakberhasilan pemungutan retribusi terminal terlihat jelas dari realisasi yang diperoleh setiap tahunnya.

Setiap tahunnya realisasi Retribusi Terminal ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, dimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Terminal
Kabupaten Pontianak Tahun 2009-2012

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
1	2009	50.000.000	22.767.000	45,5 %
2	2010	50.000.000	26.549.200	53,1 %
3	2011	100.000.000	56.366.500	56,4 %
4	2012	100.000.000	75.125.000	75,1 %

Sumber : Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Desember 2012

Berdasarkan tabel diatas, permasalahan yang mendasar adalah tidak tercapainya realisasi target yang ditetapkan. Tahun 2009 dan 2010 target yang ditetapkan Rp. 50.000.000, sedangkan tahun 2011 dan 2012 target yang ditetapkan Rp.100.000.000. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010 adanya revisi peraturan daerah.

Perubahan terget yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Pontianak dikarenakan karena adanya perubahan peraturan daerah. Mulai tahun 2010 peraturan daerah tentang Retribusi Terminal ditambah objek retribusinya. Selain angkutan umum, kios dan gerobak yang ada didalam terminal juga menjadi objek retribusi. Penambahan subjek retribusi diikuti juga dengan perubahan tarif setiap angkutan umum, kios maupun gerobak.

Berdasarkan dari tabel diatas Dari tahun 2009-2012 terjadi peningkatan hasil realisasi yang diperoleh. peningkatan realisasi pada tahun 2009 ke 2010 sebanyak 7,6%, peningkatan realisasi pada tahun 2010 ke 2011 sebanyak 3,3%, peningkatan realisasi pada tahun 2011 ke 2012

18,7 %. Peningkatan hasil realisasi ini dikarenakan penambahan subjek retribusi. Penagihan untuk kios maupun gerobak langsung dipungut dilokasi penjualan oleh petugas pemungut.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang pada pemaparan diatas, maka hal yang menjadi kajian peneliti yaitu “Bagaimana proses Implementasi Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pontianak?”.

3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata.
- b. Untuk menjelaskan Sumberdaya dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata.
- c. Untuk menganalisa Disposisi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata.

- d. Untuk menggambarkan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata.

4. Manfaat Penelitian

Dari sisi teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai media aplikasi teori, yang dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan dan pengalaman peneliti. Selain itu, peneliti ini juga bermanfaat untuk menjadi bahan pengkajian dan pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Pemerintahan.

Dari sisi praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai solusi dari pemecahan masalah yang dihadapi pemerintah, khususnya terkait dengan implementasi tentang Retribusi Terminal. Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk dijadikan pembanding bagi penelitian lainnya yang khusus meneliti dengan tema implementasi kebijakan.

B. KERANGKA TEORI DAN METODELOGI

1. Kerangka Teori

Menurut Edward III (dalam Nugroho 2008 : 636) “ ada empat isu pokok agar implementasi menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes* dan *bureaucratic structure*.

a. Komunikasi

Kata atau istilah komunikasi (dari bahasa Inggris "*communication*"), secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin *communicatus*, dan perkataan ini bersumber pada kata *communis*. Dalam kata *communis* ini memiliki makna 'berbagi' atau 'menjadi milik bersama' yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna.

Menurut Edward (dalam Nawawi, 2009:137) menegaskan bahwa :

"ada 3 hal yang diperkukan dalam komunikasi, yaitu (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula kejelasannya, (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan".

Menurut Edward (dalam Agustino, 2006:151) menegaskan bahwa : .

"Kejelasan merupakan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakejelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Konsistensi merupakan perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan".

b. Sumberdaya

Menurut Subarsono (2005:91) walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara

jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada dimasyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat (Nawawi, 2009:137).

Menurut Edward (dalam Agustino, 2006:151-152) menegaskan bahwa :

"Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen.

Pertama, Staf merupakan sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya

Kedua, Informasi mempunyai dua bentuk dalam implementasi kebijakannya. Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Ketiga, Wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Keempat, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil".

c. Disposisi

Menurut Nawawi (2009:137) Suatu Disposisi dalam implementasi dan

karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward (dalam Agustino, 2006: 152-153) menegaskan bahwa :

Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur organisasi kearah yang lebih baik, adalah: Standar Operating Prosedurs (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja”.

2. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini digunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai keadaan sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji Subjek pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini antara lain : Kepala Dinas, kepala bidang Lalu Lintas dan Angkutan, kasi angkutan, petugas pemungut retribusi, supir angkutan umum dan pedagang.

Kemudian Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan teknik dokumentasi. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam

menguji keabsahan data pada penelitian ini adalah teknik triangulasi. Dimana data yang diperoleh baik dengan cara wawancara, observasi. Akan dicross check kemudian dianalisa secara lebih terfokus sehingga akan menghasilkan data yang lebih akurat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Penilaian pelaksanaan retribusi terminal di Dinas perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Pontianak.

Pelaksanaan Retribusi Terminal dinilai dari keempat aspek, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dari keempat aspek ini menjadi acuan dalam menganalisis penelitian ini.

Aspek Komunikasi, pelaksanaan sosialisasi tentang retribusi terminal baru diadakan sekali di aula terminal mempawah dengan mengundang perwakilan dari setiap supir angkutan umum dan para pedagang kaki lima. Karena keterbatasan yang diundang penyaluran isi peraturan daerah masih kurang jelas.

Aspek Sumberdaya, sumberdaya manusia yang terlibat sebagai pemungut retribusi masih sangat kurang. Fasilitas pos penjagaan juga masih terlihat belum optimal. Terminal sungai pinyuh dan terminal Jungkat juga belum mempunyai pos penjagaan.

Aspek Disposisi atau sikap pelaksana, petugas pemungut retribusi masih kurang jujur akan memungut tarif retribusi. Petugas tersebut masih memungut tarif retribusi tidak sesuai dengan isi peraturan daerah.

Aspek struktur Birokrasi, dalam pelaksanaan retribusi terminal SOPs (*Structure Operating Procedures*) belum ada. SOPs ini merupakan acuan petugas dalam melaksanakan tugasnya.

2. Keterbatasan Studi

Selama melakukan penelitian tentang implementasi retribusi terminal, peneliti mengalami kendala- kendala sehingga peneliti harus bekerja dengan ekstra dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah Keterbatasan waktu penelitian karena kurangnya keterbukaan informan dalam memberikan informasi terkait permasalahan yang ada hal ini dikarenakan adanya perasaan takut kepada atasan apabila memberikan penilaian yang negatif. Serta adanya kecurigaan karena khawatir penulis akan menulis mengenai kejelekan-kejelekan instansi sehingga penulis harus lebih keras menggali informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Beberapa informan terkesan kurang serius dan memuaskan dalam memberikan jawaban mengenai informasi yang diberikan terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah Kabupaten Sanggau yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dan telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku Bacaan

- Adi, Yusti Aprilian. 2010. *"Implementasi Strategi Peningkatan Retribusi Parkir Kota Cilegon"*. Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung* : Alfabeta
- , 2005. *Politik dan Otonomi Daerah. Serang* : Untirta Press.
- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Pontianak Dalam Angka*, tahun 2012.
- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono, 2002. *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*. Semarang : UNDIP.
- Davey, Kanneth. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Terjemahan Ammullah, dkk. Jakarta: UI Press.
- Dunn, William. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasan, Erliana, 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pontianak 2012
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, Sugeng. 2003. *"Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Terminal di Pemerintah Kota Malang"*. (Jurnal). 3 Desember 2003.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: ITS Press.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Suandi, Erly. 2002. *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba.

Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*, Alfabeta, Bandung.

-----, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Tohardi, Ahmad. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Untan

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Widarta, I. 2005, *Cara Mudah Memahami Undang-Undang No. 32 Tahun 2004*, Yogyakarta, Pondok Edukasi

Peraturan Pemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : DWI KUSUMAWARDANI

NIM / Periode lulus : E42009010/ 2013

Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address/HP : dwikusumawardani_dwi@yahoo.co.id/ 085245950227

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DI DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN, DAN
PARIWISATA KABUPATEN PONTIANAK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ fulltext

☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui

Pengelola Jurnal.....IP.....



Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak

Pada Tanggal : 11 September 2013

(DWIKUSUMAWARDANI)